

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency theory*)

Konsep teori agensi dilatarbelakangi atas permasalahan agensi yang terjadi pada suatu perusahaan ketika pengurusan terpisah dari kepemilikannya. Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa pihak antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan timbul konflik yang dinamakan *agency conflict* (Gwenda, 2013) dalam (Jensen dan Meckeling, 1976). *Agency conflict* yang terjadi antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dalam mencapai tujuan yaitu pengambilan keputusan tentang kebijakan dividen, keputusan pendanaan dan memaksimalkan nilai perusahaan, maka dari itu wewenang dan tanggungjawab *principal* maupun *agent* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Gwenda (2013) dalam Benhart dan Rosentein (1998) menyatakan bahwa salah satu cara mengatasi masalah keagenan tersebut, yaitu dengan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan.

2. Nilai Perusahaan (Tobin's Q)

Menurut taufik (2016) mengemukakan bahwa nilai perusahaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan gambaran dari ekuitas dan nilai buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total utang maupun nilai buku dari total ekuitas. Adapun tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan cara peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Salah satu cara untuk mengukur nilai perusahaan yaitu dengan menggunakan Tobin's Q, karena rasio ini dinilai mampu memberikan informasi paling baik dan mampu menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan. Rasio Q adalah ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber daya ekonomis dalam kekuasaannya (Herawaty, 2008). Apabila rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru dan apabila rasio-q dibawah satu, maka investasi dalam aktiva tidaklah menarik.

Nilai perusahaan dapat menggambarkan seberapa baik atau buruknya manajemen mengelola kekayaan maupun sumber daya ekonomisnya, ini dapat terlihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Ada juga yang mendefinisikan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai pasar karena dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum, sehingga harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Penelitian yang dilakukan Taufik

(2016) dalam Lastanti (2008) yang menyatakan bahwa struktur *corporate governance* secara positif mempengaruhi nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan diproksi dengan Tobin's Q.

3. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Herawaty (2010) dalam Sulistyanto dan Wibisono (2003) menyatakan bahwa *good corporate governance* atau yang sering disebut tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Dengan adanya segala tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapainya dapat diawasi dan dikendalikan sehingga nantinya akan mampu menaikkan nilai perusahaan.

Secara teoritis, apabila suatu perusahaan menerapkan GCG dalam pengurusannya dapat dipastikan mampu meningkatkan nilai perusahaan karena dengan penerapan GCG yang baik dapat mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan wewenang maupun keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor (Gwenda, 2013) dalam (Newell dan Wilson, 2002).

b. Mekanisme Good Corporate Governance

Sistem *corporate governance* pada suatu perusahaan dibagi menjadi dua macam yaitu, mekanisme *internal governance* dan mekanisme *external governance* yang sifatnya tergantung yang

dianjurkan (ndaningrum wulandari dalam charlie weir et al, 2000). Adapun indikator mekanisme *internal governace* yang terdiri dari jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen, dan *debt to equity*. Sedangkan, indikator mekanisme *external governance* yang terdiri dari kepemilikan instituional (ndaningrum dalam S. Beiner *et al.*, 2003). Dengan adanya kedua mekanisme *corporate governance* diharapkan manajer dalam perusahaan termotivasi untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.

c. Manfaat *Good Corpotae Governance*

Tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- 2) Mempermudah memperoleh biaya modal yang lebih murah.
- 3) Memberikan keputusan dan kebijakan yang lebih baik dalam peningkatan kinerja ekonomi perusahaan.
- 4) Meningkatkan dan mengembalikan keyakinan atau kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan.
- 5) Meningkatkan kepuasan para pemegang saham dengan kinerja perusahaan yang mampu meningkatkan *shareholder value* maupun dividen.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk

mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Solihin, 2009 : 123)

d. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG (2006), ada lima prinsip dasar GCG, terdiri dari:

- 1) *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan, dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan maupun dalam keterbukaan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan dalam pengelola perusahaan dapat terlaksana secara efektif.
- 3) *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 4) *Kemandirian (indenpedency)*, yaitu situasi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) *Kewajaran (fairness)*, keadilan dan kesetaraan, terdapat hak-hak yang sama antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terjadi akibat adanya perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

4. Kepemilikan Institusional

Menurut Herawaty (2008) menyatakan bahwa investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih karena dapat menggunakan informasi periode sekarang dan memprediksi laba masa depan dibandingkan investor non institusional. Hal ini dikarenakan investor institusional memiliki akses atas sumber informasi yang lebih tepat waktu dan relevan yang dapat mengetahui keberadaan pengelolaan laba lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan investor individual.

bahwa kepemilikan institusional yang tinggi berdampak pada harga saham perusahaan dipasar modal sehingga kepemilikan institusional mampu menjadi mekanisme yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan manajer (Herawaty, 2010) dalam (Midiastuty dan Machfoedz, 2003).

5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham dan juga berarti pemilik perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Menurut Siallgan dan Machfoedz , 2006) dalam (Jansen dan Meckling, 1976).

Menurut Siallgan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa ketika kepemilikan manajemen rendah, maka peluang terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Sementara di dalam perusahaan tanpa adanya kepemilikan manajerial, dimana manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kinerja perusahaan akan lebih baik jika saham perusahaan dimiliki oleh manajer, karena manajer merasa memiliki perusahaan dan tidak lagi sebagai tenaga profesional yang digaji tetapi juga sebagai pemilik perusahaan (Widhianningrum & Amah, 2012) dalam (Christiawan dan Tarigan, 2007).

6. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaannya dalam strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Lastanti, 2008) dalam (Taufik, 2016). Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan fungsinya mampu sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan untuk memberikan perlindungan pemegang saham minoritas, sehingga pada hakekatnya dewan komisaris independen bersikap secara independen dalam melaksanakan tugasnya, semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan.

7. Komite Audit

Dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui Kep339/BEJ/07-2001 mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta dapat mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris.

Komite audit memiliki tanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengawasi pengendalian internal (audit internal), yang diharapkan dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen. Komite audit dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Sehingga hasilnya mampu mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsensus laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan, (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal, (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

8. Ukuran Dewan Direksi

Menurut pedoman umum GVG tagun 2006, ukuran dewan direksi sebagai agen perusahaan bertugas dan bertanggungjawab mengelola perusahaan. Adapun fungsi dewan direksi dalam mengelola perusahaannya, setidaknya ada lima tugas utama yaitu (Solihin, 2009 : 116):

- a. Kepengurusan, meliputi tugas penyusunan baik visi maupun misi perusahaan, serta penyusunan program jangka panjang dan jangka pendek.
- b. Manajemen risiko, meliputi tugas penyusunan serta pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
 - 1) Pengendalian internal, meliputi penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - 2) Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
 - 3) Tanggungjawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggungjawab sosial.

Dewan direksi secara khusus ditugaskan untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Dewan direksi tersebut bertugas untuk menyewa,

memecat, memantau, dan memberikan kompensasi manajemen hanya untuk memaksimalkan nilai pemegang saham (Denis & McConnell, 2001).

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Susanti (2010) dalam Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan Institusional adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi *agency conflict* karena semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan semakin meningkat. Yang dimaksud dengan eksternal adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Dengan kata lain, kepemilikan institusional bisa diartikan sejumlah perusahaan atau lembaga yang mengelola dana atas nama orang lain atau institusi.

Dengan adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional, memiliki peran yang sangat penting sebagai memonitor manajemen. Namaun tidak menutup kemungkinan, kepemilikan institusional akan memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan tindakan mementingkan kepentingan perusahaannya semata-mata dilakukan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini jelas akan merugikan operasional perusahaan sehingga dapat menurunkan kinerja perusahaan yang nantinya akan

mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin pada tingkat harga sahamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, Yokhebed, dan Tampubolon (2016), Prastuti dan Budiasih (2015) Menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Herawaty (2008) dalam Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi salah satu mekanisme yang mampu mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan cara menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Adanya kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan apabila kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya.

Lemons dan Lins (2001) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, akan menurunkan harga saham perusahaan. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan manajerial maka konflik keagenan semakin sering terjadi akibat adanya tindakan oportunistik dari manajemen, sehingga mengakibatkan turunnya kepercayaan para investor terhadap perusahaan. Pada akhirnya, permintaan terhadap saham perusahaan akan menurun dan secara otomatis nilai

perusahaan akan turun juga. Sehingga hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), Sukrini (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Cravens dan Wallace(2001) dalam Gwenda (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen ditunjuk sebagai mekanisme pengawasan secara independen atas proses dewan untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja. Sebuah perusahaan diwajibkan untuk memiliki komisaris independen karena anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, maupun anggota direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perseroan, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Dewan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan monitoring agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance*.

Beberapa penelitian terdahulu antara lain Siallagan (2006) dan Taufik (2016) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mampu meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen melalui fungsi monitoring melalui pelaporan keuangan, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam hal memelihara proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*, (Susanti, 2010). Komite audit memiliki tanggungjawab kepada komisaris dan internal audit bertanggungjawab kepada direktur.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit internal dan eksternal, serta mampu meminimalisir risiko oportunistik manajemen. Hasil penelitian dari Gwenda (2013) dan Siallagan (2006) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan Signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai laba yang diperoleh perusahaan yang membentuk komite audit memiliki kualitas yang lebih baik daripada laba

yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_4 : Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

5. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran dewan direksi merupakan jumlah atau komposisi dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan, maka semakin baik karena akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan., dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2016) dan Gwenda (2013) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_5 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

C. Penelitian Terdahulu

1. Kepemilikan Institusional

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2016), Herawati (2008), Susanti, Rahmawati dan Aryani (2010) dan Sukrini (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan kepemilikan institusional yang tinggi berdampak pada harga saham perusahaan dipasar modal, sehingga kepemilikan institusional mampu menjadi mekanisme GCG yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, Yokhebed, dan Tampubolon (2016), Prastuti dan Budiasih (2015) Menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas akan diabaikan oleh investor institusional mayoritas karena cenderung berkompromi dengan pihak manajemen, sehingga harga saham mengalami penurunan akibat adanya asumsi mengambil kebijakan atau tindakan oportunistik dan investor institusional lebih tertarik dengan laba sekarang. Apabila mereka memutuskan untuk menarik saham dalam jumlah yang besar, maka otomatis hal tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan.

2. Kepemilikan Manajerial

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2016), Susanti, Rahmawati dan Aryani (2010), Nurhayati dan Medyawati (2012) dan Ridwan dan Gunardi (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme GCG yang dapat membatsi perilaku oportunistik manajer dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), Sukrini (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan saham yang belum signifikan menyebabkan manajer lebih mementingkan tujuannya sebagai pemegang saham.

3. Dewan Komisaris Independen

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2016), Herawati (2008) dan Siallagan dan machfoedz (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen merupakan mekanisme kontrol yang kuat dari komisaris independen terhadap manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut merupakan vital bagi terciptanya *good corporate governance*

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Gunardi (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan tindakan memanipulasi laba lebih besar kemungkinannya dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan ini menunjukkan bahwa fungsi independensi dewan direksi cenderung lemah sehingga akan berdampak pada nilai perusahaan.

4. Komite Audit

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2016), dan Siallahagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa harapan KAP yang tergabung dalam BIG 2 akan meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Rahmawati dan Aryani (2010), Ridwan dan Gunardi (2013) Menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit bukan jaminan kinerja perusahaan akan semakin lebih baik, sehingga komite audit juga bukan faktor untuk mempertimbangkan dalam mengapresiasi nilai perusahaan.

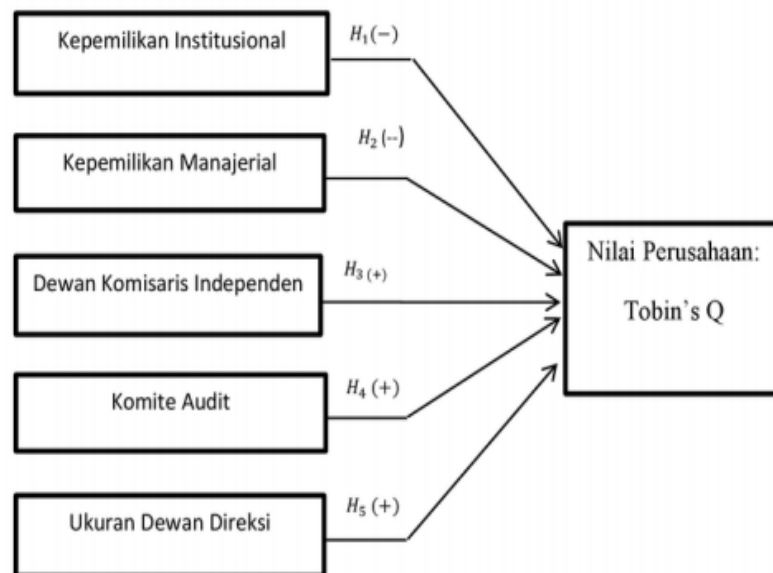
5. Ukuran Dewan Direksi

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki peran penting bagi perusahaan karena ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti, Supatmi dan Sastra (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

D. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah ditemukan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut.



Gambar 1.1

E. Hipotesis

H_1 = Kepemilikan Instritusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H_2 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H_3 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan

H_4 = Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H_5 = Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Q = a + b_1KI_1 + b_2KM_2 + b_3DKI_3 + b_4KA_4 + b_5UDD_5$$

Keterangan:

Q = Nilai Perusahaan (Tobin's Q)

a = Konstanta

$b_1 - b_5$ = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

KI_1 = Kepemilikan institusional

KM_2 = Kepemilikan Manajerial

DKI_3 = Dewan Komisaris Independen

KA_4 = Komite Audit

UDD_5 = Ukuran Dewan Direksi

e = Kesalahan atau gangguan